



BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR: 821/VI/2014

IV/JUNI 2014



**Masyarakat Harus Ikut
Ciptakan Pemilu Damai**

KEGIATAN DPR-RI MINGGU KETIGA JUNI 2014

Kegiatan DPR RI pada minggu ketiga bulan Juni 2014 diisi dengan rapat kerja Komisi VII dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI. Komisi VII juga mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian ESDM RI, Kemenristek dan Direktur Utama PT LEN. Terdapat pula Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 18 Juni 2014. Pertemuan Ketua DPR dengan Rektor dan anggota BEM Universitas Sejabodetabek pun diadakan dalam rangka mengupayakan Pilpres yang luber, jujur dan aman.

Oleh: Ketua DPR-RI, DR.H. Marzuki Alie

Rapat Kerja Komisi VII

Rapat Kerja Komisi VII pada tanggal 10 Juni 2014 dengan Menteri ESDM RI membahas dua point utama, yaitu; (1) Pembahasan dan Penetapan Asumsi ICP, Lifting Minyak Bumi, LPG bersubsidi, Subsidi BBN, Alpha dan Volume serta besaran subsidi BBM dalam RUU perubahan T.A 2014, (2) Pembahasan dan Penetapan Asumsi Dasar Subsidi Listrik dalam RUU Perubahan APBN T.A 2014. Adapun kesimpulan rapat kerja tersebut adalah bahwa Komisi VII DPR RI dapat menerima dan menyetujui usulan pemerintah tentang Asumsi Dasar ICP, Produksi/ Lifting Minyak dan Gas Bumi, Volume BBM dan BBN bersubsidi, LPG 3 Kg, Subsidi BBN, Subsidi LGV, Alpha BBM bersubsidi dan subsidi listrik dalam RAPBN-P tahun anggaran 2014.



Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK

Pada acara penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2013 kepada DPR RI, Ketua BPK menyampaikan bahwa LKPP tahun 2013 meliputi neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Dalam laporan realisasi anggaran tahun 2013, pemerintah melaporkan realisasi pendapatan negara dan hibah sebesar Rp. 1.438,89 triliun atau 95,80% dari anggaran tahun 2013 atau 107,53% dari realisasi tahun 2012, realisasi belanja dan transfer sebesar Rp. 1.650,56 triliun atau 95,62% dari anggaran tahun 2013 atau 110,67% dari realisasi tahun 2012, serta realisasi defisit sebesar Rp. 211,67 triliun atau 138,08% dari defisit tahun 2012. Dalam neraca per

Rapat Dengar Pendapat Komisi VII

RDP Komisi VII dengan Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM RI, Deputi Bidang Relevansi dan Produktivitas Iptek Kemenristek RI, dan Direktur Utama PT. Lembaga Elektronik Nasional (LEN) berlangsung pada tanggal 3 Juni 2014. Acara membahas tentang pelaksanaan fungsi pengawasan, pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan. Pada kesimpulan rapat yang ada, Komisi VII DPR RI mendesak Dirjen EBTKE Kementerian ESDM untuk memprioritaskan penggunaan produk teknologi dalam negeri di dalam pemanfaatan dan pengembangan energi baru dan terbarukan di Indonesia, sebagai upaya mendukung penguatan industri di dalam negeri.

31 Desember 2013, pemerintah menyajikan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp. 66,59 triliun, aset sebesar Rp. 3.567,59 triliun dan kewajiban sebesar Rp. 2.652,10 triliun terutama berupa utang jangka panjang dalam dan luar negeri sebesar Rp. 1.890,75 triliun. Atas LKPP tahun 2013 tersebut, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian sama dengan opini atas LKPP tahun 2012. Ada dua permasalahan yang menjadi pengecualian atas kewajaran LKPP tahun 2013 yaitu permasalahan piutang bukan pajak pada Bendahara Umum Negara (BUN) dan permasalahan Saldo Anggaran Lebih (SAL).

Di samping permasalahan yang menjadi pengecualian kewajaran LKPP tahun 2013 tersebut, BPK juga menemukan

permasalahan signifikan lain terkait kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain opini atas LKPP serta hasil pemeriksaan pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam kerangka pemeriksaan laporan keuangan tersebut, kami sampaikan juga beberapa permasalahan signifikan dalam hasil pemeriksaan BKP selama ini dan kondisi yang perlu mendapat perhatian pemerintah: (1) permasalahan subsidi. Subsidi meliputi subsidi energi dan subsidi non energi, dengan perkembangan selama 2009-2014. Pada tahun 2009 direalisasikan sebesar Rp. 138,1 triliun. Pada 2010 sebesar Rp. 192,7 triliun dan pada tahun 2011 sebesar Rp. 295,4 triliun. Sedangkan tahun 2012 sebesar Rp. 346,4 triliun, tahun 2013 dianggarkan sebesar Rp. 348,1 triliun dan pada 2014 dianggarkan sebesar Rp. 333,7 triliun. Sehingga selama 5 tahun terakhir, alokasi subsidi berkisar 20-30% total belanja pemerintah pusat. Subsidi energi terdiri dari subsidi BBM dan subsidi listrik, sedangkan subsidi non energi antara lain terdiri dari subsidi pangan termasuk subsidi pupuk. BPK mengingatkan kembali hasil pemeriksaan BPK sebelumnya yang menunjukkan bahwa Pemerintah belum memiliki kebijakan dan kriteria yang jelas untuk memastikan ketepatan sasaran realisasi subsidi energi.

Permasalahan ke (2) adalah penerimaan pajak. Realisasi pendapatan pajak tahun 2013 adalah sebesar Rp. 1,099 triliun lebih kecil 4% dari target yang ditetapkan. Kondisi *short-fall* penerimaan perpajakan ini dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal pemerintah yang meliputi tiga elemen, yaitu; kebijakan pajak, institusi pemungut pajak, dan wajib pajak. Permasalahan ke (3) adalah permasalahan dana otonomi khusus (Otsus) Papua, yaitu: kelemahan dalam hal perencanaan dan grand design kebijakan, kelemahan regulasi pelaksanaan, ketidakcukupan ruang dan peran bagi kekhususan masyarakat Papua dalam pengelolaan dana Otsus (seperti: budaya lokal, pemimpin dan sumber daya manusia lokal, perilaku lokal, pemimpin dan sumber daya manusia lokal, perilaku komunal, dll), dan kelemahan supervisi.

Rapat Paripurna 18 Juni 2014

Rapat Paripurna tanggal 18 Juni membahas tentang penambahan program legislasi nasional rancangan undang-undang prioritas tahun 2014. Badan legislasi telah menerima pengajuan usulan penambahan satu RUU dari Komisi VIII DPR dan dua RUU dari Pemerintah untuk dimasukkan RUU prioritas tahun 2014, yaitu; (1) usulan dari DPR RI dengan judul RUU tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan (2) usulan dari Pemerintah dengan judul: (1) RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia dan (2) RUU tentang Bahan Kimia. Hasil rapat Paripurna hanya menyetujui satu dari tiga RUU, yaitu RUU tentang Perairan Indonesia. Sedangkan dua RUU berikutnya, yaitu RUU tentang Bahan Kimia dan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tidak disetujui untuk menjadi tambahan prolegnas RUU prioritas tahun 2014. Dengan demikian, maka prolegnas RUU prioritas tahun 2014 mengalami perubahan dari yang semula berjumlah 66 RUU dan 5 daftar RUU kumulatif terbuka menjadi



67 RUU dan 5 daftar RUU kumulatif terbuka.

Pertemuan Ketua DPR dengan Rektor dan anggota BEM Universitas

DPR sebagai lembaga yang ikut bertanggung jawab terhadap berjalannya proses demokrasi ingin berkontribusi agar pilpres yang akan datang dapat berjalan dengan bersih, bebas, jujur dan adil. Karenanya, DPR mengundang para Rektor dan anggota BEM se-Jabodetabek, Jawa Barat dan Banten. Sebagai penggagas acara, CEPP (Center for Election and Political Party) FISIP UI menyatakan bahwa perkumpulan yang dihadiri oleh pihak rektorat dari 14 Universitas dan mahasiswa (bertindak atas nama pribadi dan bukan perwakilan), adalah penting dalam rangka mengupayakan terciptanya pemilu yang jujur, luber dan aman. Dalam pengantarnya, Ketua DPR menyatakan bahwa pertemuan ini dimaksudkan untuk mengajak berbagai elemen masyarakat, khususnya insan akademis untuk turut bersama-sama dengan DPR RI, mengawasi jalannya penyelenggaraan Pemilu 9 Juli 2014 agar berjalan damai. DPR mengharapkan adanya komitmen yang tercipta dari pertemuan awal tersebut. Menghadapi Pilpres Juli 2014 yang diikuti oleh dua pasangan capres cawapres, segala kemungkinan konflik dapat terjadi. Konflik yang ada, sangat rentan terjadi di kalangan akar rumput (*grass roots*). Perdebatan yang muncul di media sosial dan dalam pertemuan-pertemuan para pendukung kedua calon. Konflik tersebut bisa semakin tajam dan berpotensi negatif bila terjadi kecurangan dan salah satu pasangan capres cawapres juga pendukungnya merasa dirugikan. Pertemuan ini diharapkan dapat menjadi ajang silaturahmi awal dan memunculkan komitmen bersama untuk mendukung pemilu yang damai, sebagai salah satu komponen dalam demokratisasi.

Pada pertemuan tersebut, Rektor dan Wakil Rektor memberikan masukan, pandangan, saran serta pertanyaan tentang pengawasan dan keterlibatan aktif kaum akademisi dalam mengawal terselenggaranya pilpres yang baik. Sejumlah mahasiswa pun menyatakan pandangan nya terkait Pemilu dan kontribusi awal yang sudah mereka lakukan. Sebagai generasi muda, penerus estafet kepemimpinan bangsa, partisipasi politik kaum muda sangat dibutuhkan oleh negeri ini.***

Masyarakat Harus Ikut Ciptakan Pemilu Damai



Ketua DPR RI Marzuki Alie didampingi Pimpinan Komisi II DPR saat menerima delegasi dari 14 perguruan tinggi se-Jabodetabek

Agenda pemilu 2014 tinggal menyisakan pemilihan presiden (Pilpres) pada 9 Juli yang akan datang. *Head to head* dua pasang capres dan cawapres dalam Pilpres kali ini, rentan gesekan sosial. Ditambah lagi media penyiaran yang tidak bisa bersikap netral. Semua elemen masyarakat dihimbau ikut ciptakan pemilu yang damai dan aman.

Ketua DPR RI Marzuki Alie menghimbau agar semua elemen masyarakat berpartisipasi mengawasi pelaksanaan Pilpres 2014. "Semua elemen masyarakat agar berpartisipasi memberikan kontribusi untuk mengawasi dan mengawal Pilpres 9 Juli yang akan datang ini bisa berlangsung secara damai dan aman. Itu yang kita harapkan."

Harapan Marzuki ini disampaikan da-

lam pertemuan dengan delegasi dari 14 perguruan tinggi se-Jabodetabek, Banten, dan Jawa Barat, Rabu (18/6). Acara ini digagas oleh *Central for Election and Political Party* (CEPP) Universitas Indonesia. Hadir mendampingi Marzuki, Agun Gunanjar Sudarsa Ketua Komisi II, Arif Wibowo Wakil Ketua Komisi II, dan Azhar Romli Anggota Komisi II.

Pertemuan ini mengajak semua civitas akademika untuk peduli menciptakan pemilu yang menyejukkan di tengah masyarakat. Pro aktif perguruan tinggi sangat dibutuhkan dalam ikut merumuskan formulasi kampanye damai. Kampanye damai dan aman harus dikampanyekan secara masif. "Sebagai negara demokrasi, kompetisi dalam bentuk pemilu ini merupakan keniscayaan. Jangan sampai kompetisi

in memecah belah masyarakat," papar Marzuki.

Marzuki juga menyayangkan, media massa baik cetak maupun elektronik tak bisa bersikap netral dalam Pilpres kali ini. Media sudah terpolarisasi secara diametral di antara dua kubu kontestasi capres dan cawapres. "Ini membahayakan bagi NKRI. Ini membahayakan bagi masa depan Indonesia," ungkap Marzuki.

DPR, lanjut Marzuki, berkepentingan mengawal Pilpres berjalan secara jujur, adil, langsung, bebas, dan rahasia. Harapan ini disepakati pula oleh delegasi 14 perguruan tinggi yang hadir, di antaranya UI, ITB, IPB, UNPAD, UBK, Universitas Pancasila, dan Universitas Serang Raya. (mh)/foto:iwan armanias/parle/hr.

DPR Dukung Palu Jadi Kawasan Ekonomi Khusus

Palu, Sulawesi Tengah sudah ditetapkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Untuk itu diperlukan dukungan infrastruktur untuk menunjang kegiatan ekonomi. Pelabuhan Pantoloan sudah mulai beroperasi, dan terminal baru di Bandar Udara Mutiara Sis Al-Jufri Palu sudah diresmikan pada Maret lalu.

“Jika sudah ditetapkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus, maka penunjangnya adalah infrastruktur. Infrastruktur yang penting itu adalah pelabuhan dan akses jalan yang bisa memberikan konektivitas seluruh wilayah untuk meningkatkan arus barang dan orang. Ini adalah salah satu penunjang seluruh kegiatan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi,” jelas Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V Muhidin M Said, saat memberikan keterangan pers di Palu, Selasa (17/06).

Wakil Ketua Komisi V ini menilai, sebagian infrastruktur sudah dibangun di Palu ini. Sehingga, jika KEK ini mulai berjalan, infrastruktur yang sudah ada dapat mendukung kegiatan industri.

“Saya kira ini sangat bagus sekali, karena menunjang KEK. KEK itu kan jaraknya kurang lebih 2 kilometer dari situ. Pelabuhan ini menjadi salah satu penunjang utama dari KEK, karena di kawasan itu nantinya ada industri-industri. Akses jalan juga sudah dibuat jalan bebas hambatan, tetapi tidak berbayar, non tol. Ini sekarang sedang dikerjakan, namun harus disempurnakan. Kemudian, ada jalan *fly over* yang menghubungkan pelabuhan dengan kawasan ekonomi itu, sehingga kegiatan pelabuhan ini tidak terganggu,” jelas Politisi Golkar ini.

Hal senada diungkapkan oleh Anggota Komisi V Sigit



Wakil Ketua Komisi V DPR Muhidin M. Said

Sosiantomo. Ia menilai, walaupun pelabuhan Pantoloan sudah berfungsi dengan baik, akses jalan menuju pelabuhan tetap harus diperhatikan. Sehingga, kondisi jalan semakin mendukung aktifitas pelabuhan.

“Kalau pelabuhan berkembang besar jalannya mesti diperhatikan agar menjadi tidak macet. Makanya perlu diatur areanya, mana area yang bisa dilewati *tronton* peti kemas, jadi bisa dibedakan dengan kendaraan yang umum,” imbuh Politisi PKS ini. (sf), foto : sofyandefendi/parle/hr.

Indonesia Tetap Menentang Penjajahan dan Terorisme



Suasana Sidang Standing Committee Meeting on Political Affairs-Asian Parliamentary Assembly di Turki

Indonesia tetap menentang segala bentuk terorisme dan penjajahan di dunia, karena sudah merupakan amanat dalam konstitusi Indonesia. Pemberantasan terorisme sebaiknya tidak menggunakan metode perang dingin, karena akan menyuburkan konfrontasi dan tentu tak sejalan dengan prinsip demokrasi.

Demikian disampaikan Ketua Delegasi DPR RI Roestanto Wahidi dalam Sidang *Standing Committee Meeting on Political Affairs-Asian Parliamentary Assembly* di Turki, baru-baru ini. Pertemuan tahun ini dihadiri 20 anggota parlemen dari 10 negara *Asian Parliamentary Assembly* (APA). Selain Indonesia, ada Bahrain, Iran, Yordania, Kazakhstan, Libanon, Pakistan, Rusia, Saudi Arabia, dan Turki sendiri sebagai tuan rumah.



Sidang juga membahas mengenai penguatan hubungan persahabatan di antara negara-negara anggota APA dan pelaksanaan *the Second International Conference on Friendship and Cooperation* untuk mengonsolidasi hasil-hasil konferensi APA pertama yang diadakan di Solo tahun 2011. Pertemuan rutin tahunan APA ini sempat vakum selama 3 tahun, karena krisis politik dan keamanan di Suriah yang terus memburuk.

Agenda utama yang dibahas dalam pertemuan ini adalah *Measures and Methods of Materialization of Principles of Friendship and Cooperation in Asia, Engaging APA with Asian Governments and Inter-Governmental Organizations, Denunciation of Terrorism and Violent Extremism, dan Important*

Political Developments in Asia. Kesepakatan-kesepakatan yang dicapai terkait agenda tersebut dituangkan dalam empat rancangan resolusi yang kemudian diajukan ke Sidang Pleno APA untuk mendapatkan pengesahan.

Indonesia dalam sidang ini juga tetap berkomitmen untuk terus memelihara persahabatan dengan negara-negara anggota APA. Perdamaian dan stabilitas kawasan merupakan dua hal mutlak yang harus tetap dipertahankan untuk mendukung pembangunan kawasan menuju Asia yang maju dan sejahtera. Oleh karena itu, diserukan agar Parlemen negara-negara di kawasan perlu berperan aktif melalui fungsi legislasi, *budget*, dan pengawasan. (mh) foto: dok bksap/parle/hr.

Komisi IV Setujui Pemotongan Anggaran Kementan

Komisi IV DPR RI menyetujui rencana pemotongan APBN tahun 2014 Kementerian Pertanian sebesar Rp 1.902.984.562.000 dan penambahan dari pinjaman hibah luar negeri (PHLN) sebesar Rp 45.419.498.000, sehingga total pemotongan sebesar Rp 1.857.565.064.000. Dengan demikian pagu APBN perubahan tahun 2014 Kementerian pertanian sebesar Rp 13,613 Triliun

Komisi IV meminta Menteri Pertanian tetap mempertahankan program-program untuk petani agar dijadikan prioritas dalam realisasi program dan kegiatan Kementerian Pertanian pada APBN Perubahan Tahun 2014.

“Berkaitan dengan pemotongan anggaran tersebut, maka komisi IV DPR RI berharap pengurangan pagu anggaran tidak mengganggu pelaksanaan program inti, serta seluruh program dapat berjalan lancar hingga akhir tahun 2014,” kata Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron, saat memimpin Rapat Kerja Komisi IV dengan Menteri Pertanian Suswono, Selasa (17/6), di Gedung Parlemen.

Komisi bidang Pertanian dan pangan ini, menerima laporan dan memberikan apresiasi atas serapan APBN Kementerian pertanian sampai dengan tanggal 14 Juni 2014 sebesar Rp.4,262 Triliun atau 27,47 % dari pagu APBN tahun 2014 sebesar Rp.15,515 Triliun. “Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk

meningkatkan kinerja agar serapan APBN tahun 2014 dapat tercapai sesuai rencana dan target,” papar Herman.

Lebih lanjut, Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas pagu indikatif RAPBN Kementerian pertanian tahun 2015 sebesar Rp.15,825 Triliun.

Evaluasi HET Pupuk Subsidi

Selain itu, Komisi IV DPR RI mendukung untuk dilakukannya revisi terhadap Permentan Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2013 tentang kebutuhan dan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian tahun anggaran 2014 tanggal 26 November 2013 setelah penetapan APBN-P Tahun 2014, agar volume pupuk disesuaikan dengan rencana kebutuhan sebesar 9,55 juta ton.

Anggota dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Jazilul Fawaid, mengkritisi terkait dengan masalah pupuk, yang hal itu terkait juga dengan kepastian lahan produktif yang ada di negeri. Karena menurutnya kebutuhan untuk memproduksi komoditas pangan tertentu berbeda dengan komoditas lainnya.



Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron

“Nampaknya inventerisasi terhadap lahan produktif ini berapa jumlahnya kemudian non produktif berapa jumlahnya, sehingga mungkin pada lahan yang produktif dengan yang tidak produktif penggunaan pupuk pun tidak akan sama,” katanya.

Jazilul juga menyampaikan keheeranannya mengenai kebijakan pupuk bersubsidi ini. Dia mengatakan bahwa Menteri Pertanian sudah mencoba membuat skenario, yaitu ada harga eceran dinaikan, yang kemudian kembali lagi ke skenario yang kedua yang berarti menggantungkan kepada APBN. Namun, imbuhnya sementara ini sudah anggaran Kementerian Pertanian di pangkas 1,9 Triliun, sehingga mungkin perlu dikaji kembali harga pokok produksi pupuk ini. (as/pt) foto: odjie/parle/hr/

DPR Perjuangkan Asean Bebas Narkoba

Delegasi DPR RI telah menghadiri sidang AIFOCOM ke-11 (AIPA Fact-Finding Committee to Combat the Drug Menace) yang berlangsung pada tanggal 12-16 Mei 2014 di Vientiane, Laos. Sidang tahunan tersebut digelar sebagai bentuk dukungan para anggota parlemen se-ASEAN terhadap upaya pemberantasan narkoba. Sebelumnya pada tahun 2012, Indonesia pernah menjadi tuan rumah sidang AIFOCOM ke-9 di Yogyakarta.

Delegasi DPR RI terdiri dari dua orang, yaitu Politisi Golkar, Dodi Reza Alex Nurdin sebagai Ketua delegasi dan Himmatul Alyah Setiawati, dari Fraksi Partai Demokrat. Keduanya bertugas di Komisi III yang membawahi bidang hukum dan HAM, termasuk pemberantasan narkoba.

Menurut Dodi Reza, jumlah pengguna narkoba di Indonesia saat ini mencapai 4,2 juta jiwa dan tanpa penanganan yang tepat, diperkirakan dapat mencapai hampir enam juta jiwa pada tahun 2015. Ketua Delegasi DPR RI dalam laporannya menyampaikan bahwa tren penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah bergeser dari ganja (*cannabis*) menjadi ATS (*Amphetamine-Type Stimulants*) termasuk pil ekstasi.

BNN (Badan Narkotika Nasional) tengah mempromosikan tahun 2014 sebagai tahun untuk menyelamatkan para pengguna narkoba. Di bawah naungan UU Narkotika yang disahkan pada tahun 2009 lalu, para pengguna narkoba yang tidak terlibat dalam kejahatan narkoba lainnya seperti produksi dan penyelundupan, berhak untuk mendapatkan perawatan kesehatan dan rehabilitasi. Kebijakan tersebut juga diharapkan dapat mengatasi permasalahan kurangnya lapas narkoba.

Terkait harapan ASEAN bebas dari narkoba pada tahun 2015, ungkap politisi Partai Golkar ini, banyak diantara delegasi AIFOCOM yang menyangsikan hal tersebut. Pasalnya,



Delegasi DPR RI dalam Sidang AIFOCOM ke-11 di Vientiane, Laos

kondisi di lapangan menunjukkan bahwa pembudidayaan opium dan ganja masih menjadi permasalahan utama di beberapa negara ASEAN. Faktor ekonomi merupakan gajalan terbesar bagi upaya pemberantasan narkoba.

Karena itu, diperlukan indikator yang jelas untuk mengevaluasi keberhasilan ASEAN dalam memerangi narkoba. Secara umum, bebas dari narkoba adalah suatu kondisi di mana proses produksi, distribusi, dan penyalahgunaan narkoba dapat dikontrol dan dikurangi secara signifikan.

Ketua Delegasi DPR RI dalam kesempatan tersebut juga menekankan pentingnya kerjasama dan tanggung jawab yang seimbang antara negara asal (produsen), negara transit, dan negara tujuan (target pasar) dalam memerangi kejahatan narkoba. Khususnya dalam menyambut ASEAN Community 2015, diperlukan harmonisasi dalam hal legislasi dan penegakan hukum di kawasan Asia Tenggara. (mp, bksap) foto:dok. bksap/parle/hr.

Dinajani Mahdi Ganti Nova Riyanti Yusuf

Jabatan Wakil Ketua Komisi IX DPR yang diemban oleh Nova Riyanti Yusuf digantikan oleh Dinajani Mahdi, yang semula adalah Anggota Komisi IX DPR. Acara pelantikan pergantian ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso, di ruang rapat Komisi IX, Rabu (18/06).

“Ada permintaan dari fraksi Demokrat kepada Pimpinan DPR, bahwa ada pergantian di Pimpinan Komisi IX. Yang semula dijabat oleh Nova Riyanti Yusuf, diganti oleh Dinajani Mahdi,” jelas Priyo.

Dalam kesempatan itu, Politisi Golkar itu menyampaikan



Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menyerahkan palu kepemimpinan kepada Dinajani Mahdi

pesan kepada jajaran Pimpinan dan Anggota Komisi IX, untuk segera menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Komisi IX. Apalagi, sudah disepakati, reses masa persidangan ini dimulai 10 Juli esok.

“Ini hari-hari pendek di DPR untuk menyelesaikan hal yang bersifat pen-

ting. Disepakati reses mulai 10 Juli 2014. Ini memberi kesempatan kepada Komisi maupun pansus untuk segera menyelesaikan pekerjaan utama yang menjadi tanggung jawab, termasuk Komisi IX. Mungkin bila sampai tengah malam, ya harus dijalani, untuk mencari solusi terbaik,” pesan Priyo.

Priyo sempat mengungkapkan bahwa Dinajani merupakan tokoh senior yang cukup berpengaruh, dan tak salah menggantikan Nova. Sehingga, Nova yang memiliki kinerja brilian di Komisi IX, digantikan oleh tokoh senior di DPR pula. (sf) Foto: rizka/parle/hr.

Legislator Minta Perbaiki Jalan Dihentikan Saat Arus Mudik

Anggota Komisi V DPR Saleh Husein meminta kepada Pemerintah khususnya Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk menghentikan perbaikan jalan saat hari H arus mudik lebaran. Pasalnya perbaikan jalan akan menyebabkan penyempitan ruas jalan dan menambah kemacetan.

“Kami sudah minta Kemen PU agar saat hari H pelaksanaan arus mudik pengerjaan perbaikan jalan dihentikan,” katanya kepada pers sebelum Sidang Paripurna di Gedung DPR Senayan, Rabu (18/6). Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan menetapkan masa angkutan mudik jatuh pada 21 Juli 2014 hingga 5 Agustus 2014.

Politisi Partai Hanura ini mengatakan, perbaikan jalan saat arus mudik otomatis akan memakan badan jalan sehingga ruas jalan menjadi berkurang dan menyempit. Volume kendaraan yang meningkat saat arus mudik ditambah dengan adanya pengerjaan jalan menyebabkan arus



Anggota Komisi V DPR Saleh Husein

lalin menjadi tersendat sehingga bisa memperparah kemacetan.

Khususnya di ruas Pantura Saleh Husein mengharapkan hendaknya dibangun dengan beton sehingga kerusakannya tidak terlalu parah dan perawatannya murah. Jalur tersebut akan mengalami kerusakan parah apalagi bila musim hujan tiba. “Sudah jauh-jauh hari saya mengusulkan jalur

terpadat di Pulau Jawa itu dibangun dengan beton bukan aspal. Jalan aspal akan mudah rusak bila terkena air hujan,” katanya menambahkan.

Tahun ini diperkirakan pemudik meningkat dibanding jumlah pemudik tahun lalu. Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan instansinya, tahun ini ada 27,9 juta jiwa yang akan melakukan mudik saat Lebaran 2014.

Sementara itu Kementerian Perhubungan memprediksi pengguna mobil pribadi sebagai sarana angkutan mudik naik 5,61% dibanding 2013, dari 1.694.326 kendaraan menjadi 1.789.358 kendaraan. Selain itu penggunaan sepeda motor diprediksi naik 4,3% dari 2.273.615 kendaraan menjadi 2.371.378 kendaraan. Instansi ini telah mengumumkan kepada para pemudik dengan sepeda motor selain pengalihan beban, juga dalam rangka keamanan dan keselamatan maka akan diangkut dengan truk, kereta api, dan kapal laut. (mp)/foto:odjie/parle/hr.

Delegasi DPR Dukung Dibentuknya APA Eminent Persons Group

Delegasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mendukung ide akan dibentuknya APA Eminent Persons Group. Hal itu disampaikan pada pertemuan 1st APA Troika Plus Meeting, yang diadakan di Islamabad-Pakistan, belum lama ini.

Diharapkan, dengan keberadaan APA Eminent Persons Group, dapat mengkaji, mempelajari dan menganalisa proses dan peluang integrasi bagi terbentuknya Parlemen Asia, serta

dengan membandingkannya pada proses-proses integrasi yang terjadi di *European Parliament*, *African Parliament*, dan transformasi gradual yang terjadi dalam kerangka ASEAN.

“Yang perlu digarisbawahi terhadap ide APA Eminent Persons Group itu adalah keberadaannya harus memiliki manfaat nyata, dan menjadi ‘troubleshooter’ atas kompleksitas persoalan inefektivitas APA saat ini dan tantangan masa depan APA,” jelas Ketua

Delegasi DPR RI (F-PAN) Andi Anzhar Cakra Wijaya.

Dalam pertemuan tersebut, Indonesia juga diwakili Anggota BKSAP Muhammad Hidayat Nurwahid (F-PKS). Sementara, perwakilan negara yang hadir diantaranya wakil anggota Parlemen APA dari negara Afghanistan, Bahrain, Indonesia, Iran, Kamboja, Jordan, Pakistan dan Syria.

Selain itu, Delegasi DPR RI juga me-

nyampaikan beberapa poin penting, di antaranya masukan seputar pemberantasan *money laundering* ke dalam muatan *Islamabad Communique*. Usulan lainnya, agar dibentuk kelompok kerja yang dapat memberikan rencana kerja untuk meningkatkan interaksi antara APA dengan para pemerintah negara anggota APA serta dengan berbagai organisasi kerjasama internasional di wilayah Asia. Seluruh masukan Indonesia diterima oleh peserta pertemuan dan Hidayat ditunjuk untuk membentuk kelompok kerja tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Delegasi DPR RI juga untuk bertukar pandangan dan pengalaman dengan berbagai delegasi APA lainnya atas berbagai isu yang ditetapkan untuk dibahas. Isu pertama yang dibahas adalah perkembangan terakhir kondisi di Asia, dalam upaya untuk menghentikan kekerasan, mengembangkan dialog dan perdamaian di kawasan-kawasan Asia.



Pertemuan 1st APA Troika Plus Meeting, di Islamabad-Pakistan

“Isu berikutnya, bagaimana memajukan efisiensi dan aktivitas APA, termasuk interaksi dengan berbagai forum di Asia lainnya dalam bidang kerjasama antar-parlemen, ekonomi maupun pemerintahan. Dan juga strategi transformasi bertahap APA menjadi Parlemen Asia,” imbuh Hidayat.

Kunjungan Delegasi DPR RI ke acara ini merupakan agenda penting bagi Indonesia dalam konteks “*second track diplomacy*” yang dijalankan oleh DPR RI. Hal ini mengingat bahwa Indonesia terus diperhitungkan pandangan dan sikapnya dalam dinamika organisasi APA. (sf,bksap) foto:dok. bksap/parle/hr.

DPR Setujui Tambahan Dua RUU Prolegnas Prioritas 2014

Rapat Paripurna DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sohibul Iman Rabu (18/6) menyetujui tambahan dua RUU Prolegnas Prioritas tahun 2014, dari semula 66 RUU menjadi 68 RUU. Kedua RUU tersebut adalah RUU tentang Perubahan atas UU No.6/1996 tentang Perairan Indonesia dan RUU Perubahan atas UU No.23/2002 tentang Perlindungan Anak.

Semula yang diajukan ke Baleg ada tiga RUU, selain dua yang disetujui ada satu lagi yakni RUU tentang Bahan Kimia namun tidak disetujui dengan alasan keanggotaan DPR periode 2004-2009 akan segera berakhir, dikhawatirkan RUU tersebut tidak dapat diselesaikan pembahasannya.

Menurut Ketua Baleg Ignatius Mulyono yang membacakan laporan di Rapat Paripurna tersebut, alasan dilakukan pembahasan terhadap RUU perubahan atas UU No.6/1996 tentang Perairan Indonesia adalah untuk melakukan perlindungan terhadap keamanan laut sebagai konsekuensi berlakunya UNCLOS 1982.

Pengelolaan keamanan laut yang tidak terintegrasi dan tidak dalam satu komando dapat menyebabkan terjadinya peningkatan eskalasi ancaman dan pelanggaran hukum di laut. Pada gilirannya akan menganggu keamanan perairan kawasan dan perbatasan antar negara. “Perubahan hanya dilakukan terhadap ketentuan Pasal 24 ayat (3), namun terkait perubahan tersebut menyebabkan perlu ada pengaturan lebih lanjut dalam 9 pasal baru,” jelas Mulyono.



Wakil Ketua DPR RI Sohibul Iman berdialog dengan Ketua Baleg Ignatius Mulyono dan Menkumham

Semula RUU atas perubahan UU Perlindungan Anak juga tidak disetujui sebagai RUU Tambahan Prolegnas 2014, namun karena Komisi VIII tetap berkeinginan kuat agar dimasukkan sebagai RUU Tambahan Prolegnas 2014 dan bertekad membahas secara intensif dan diselesaikan oleh DPR periode sekarang ini, akhirnya Rapat Paripurna menyetujuinya.

Menkumham Amir Syamsudin juga menyambut baik persetujuan tersebut dengan mengharapkan Komisi VIII DPR segera menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan proses administrasinya. Harapan yang sama disampaikan Ketua Baleg Ignatius Mulyono dan berharap dukungan dari Pimpinan DPR, Pimpinan Komisi dan Pimpinan Fraksi agar penambahan Prolegnas dapat direalisasikan sesuai rencana, sehingga menjadi sumbangan penting dalam peningkatan kinerja DPR. (mp)/foto:andri/parle/hr.

Korpri Setjen MPR/DPR/DPD Gelar Peringatan Isra' Mi'raj 1435 H

Korpri Sekretariat Jenderal MPR/DPR/DPD Selasa (17/6) di Masjid Baiturrahman Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, menggelar peringatan Isra' Mi'raj Nabi Besar Muhammad SAW tahun 1435 H/2014 M. Acara diawali dengan pembacaan ayat suci Al-quran dilanjutkan dengan sambutan oleh anggota DPR Prof. Ali Maschan Moesa, Msi dan ceramah Isra' Mi'raj disampaikan oleh Ustad Syech Alijaber.

Dalam sambutannya Ali Maschan Moesa mengingatkan apapun ibadahnya termasuk memperingati Isra' Mi'raj ini kita harus istiqomah, ingat pada Allah selama 24 jam. Bahwa iman yang paling sempurna adalah kecintaan kita pada Allah dan Rasul Nya- harus mengalahkan segala-galanya. Kalau ini dilakukan maka tidak ada rasa kuatir dan rasa takut dan yang ada rasa penuh optimisme untuk menyongsong masa depan.

Selain itu, mengutip sebuah hadis yang diingatkan Nabi bahwa dunia adalah dilaknat oleh Allah. Allah tidak suka dunia, lebih suka akhirat sebab akhirat itu lebih baik dan kekal. Karena itu banyak-banyaklah ingat pada Allah. Yang juga dilaknat Allah adalah guru yang tidak bisa membawa muridnya ingat pada Allah.

Politisi FPKB ini juga menyebutkan, yang juga dilaknat Allah adalah orang yang merasa bodoh tetapi tidak mau belajar. "Jadi orang yang merasa bodoh lebih baik dari pada orang yang merasa pintar," ujarnya. Kalau ketiga-tiganya yaitu lebih suka akhirat, guru yang



Ali Maschan Moesa didampingi Ustad Syech Alijaber dalam peringatan Isra' Mi'raj

mengajarkan ingat pada Allah dan selalu merasa bodoh sehingga mau belajar terus, menyatu-terintegrasi maka kapanpun, apapun dan dimanapun, kita akan selalu ingat pada Allah.

Sementara itu Ustad Syech Alijaber dalam ceramahnya merasa bangga datang ke Indonesia karena jumlahnya umat Islamnya terbesar di dunia, tetapi yang terbesar punya masalah juga Indonesia. Rumah tangga bermasalah, proses politik bermasalah, dalam proses ekonomi juga bermasalah, urusan lain-lain juga bermasalah. Selain itu kasus narkoba di mana-mana dan ada anak SD sudah berbuat zina. "Kondisi ini sangat memprihatinkan. Allah belum menurunkan azabnya karena masih ada diantara bapak ibu yang suka tahajud," tegasnya.

Ditambahkan, Indonesia bisa men-

capai kemakmuran dan kesejahteraan bukan dengan memperingati Isra' Mi'raj dan acara-acara lainnya. "Tetapi kunci keselamatan dan kemakmuran adalah makmurkan masjid ini. Kalau solat kita belum beres, jangan harap urusan dunia akan beres. Jangan harap, kalau janji Allah belum beres, dunia kita akan beres," ia menambahkan

Di akhir acara, Sekjen DPR Winantuningtyastiti menyerahkan cendera mata berupa replika Gedung DPR kepada Ustad Alijaber. Dalam acara ini hadir para karyawan dan karyawanati Setjen MPR, DPR dan DPD serta para pensiunan dari Komplek DPR di wilayah Jakarta, serta dimeriahkan oleh hiburan seni Marawis dari Ponpes Assidiqiyah 2 Tangerang. (mp), foto : [iwan armanias/parole/hr.](#)

Baleg Minta Komisi Nasional Disabilitas Berkoordinasi Dengan Pemerintah

Komite Nasional Disabilitas Indonesia (KNDI) diminta melakukan koordinasi dengan pemerintah agar proses RUU tentang Penyandang Disabilitas dapat terlaksana dengan cepat.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Baleg DPR, Sunardi Ayub yang juga Ketua Panja RUU Disabilitas saat menerima

audiensi Komite Nasional Disabilitas Indonesia terkait RUU tersebut, di Ruang Rapat Baleg, Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (16/6)

"Yang ditakutkan adalah rancangan ini akan terlambat di Pansus karena tidak adanya koordinasi dengan pemerintah.

Karena itu disarankan agar pihak KNDI, melakukan koordinasi terlebih dahulu kepada pemerintah sehingga proses ini dapat terlaksana dengan cepat,” ujar Sunardi.

Untuk memaksimalkan kerja, lanjut Sunardi, dengan sisa waktu yang terbatas karena terpotong oleh reses dan pergantian masa jabatan, Baleg akan melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), kunjungan kerja, dan konseling dengan para pakar untuk membahas RUU ini.

“Saya pikir pekerjaan ini adalah pekerjaan yang mulia, langkah selanjutnya yang akan dilakukan adalah saya akan memanggil para pakar yang terkait dan kemudian mengadakan kunjungan kerja lalu kita adakan konseling,” terang Sunardi. (sc/put/mei)/foto:rizka/parle/hr.

Wakil Ketua Baleg DPR Sunardi Ayub berjabat tangan dengan perwakilan penyandang disabilitas



DPR Potong Anggaran Sejumlah Kementerian dan Lembaga

Untuk penghematan, Komisi II DPR menyetujui pemotongan anggaran sejumlah Kementerian dan Lembaga tahun 2014 dan meminta mereka untuk menyampaikan rincian perubahan RKAKL Tahun 2014 baik yang berasal dari pemotongan anggaran maupun penambahan anggaran.

Dalam kesimpulannya, Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo saat memimpin rapat dengan mitra kerjanya, Senin, (16/6) menjelaskan, untuk Kementerian Sekretariat Negara, dilakukan pemotongan anggaran sebesar Rp. 114.858.076.000 miliar, pemotongan bersumber dari pengurangan alokasi anggaran tahun 2014 yang sebelumnya sebesar Rp. 2.119.650.744.000 triliun berubah menjadi Rp. 2.005.516.178.000 triliun pada APBN-P 2014 dan Rp. 723,510 juta dari alokasi anggaran yang bersumber dari PNPB.

Demikian juga di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi II DPR menyetujui perubahan pagu Kemendagri tahun 2014 terdiri dari pemotongan anggaran sebesar Rp. 1.675.036.898.000, penambahan anggaran untuk Program Penataan Administrasi Kependudukan sebesar Rp. 545.900.000.000, dan luncheon PNPB



Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo sebesar Rp. 23.111.086.000.

“Dengan demikian alokasi anggaran tahun 2014 Kemendagri sebesar Rp. 14.903.061.263.000 berubah menjadi Rp. 13.797.035.451.00 pada APBN-P tahun 2014,” jelas Arif.

Di KemenPan dan RB disepakati dilakukan pemotongan anggaran sebesar Rp. 20.126.463.000 yang berasal dari pemotongan alokasi anggaran tahun 2014 sebesar Rp. 159.829.579.000 berubah menjadi Rp. 146.153.116.000 pada APBN-P 2014 dan penambahan anggaran untuk penguatan Reformasi Birokrasi sebesar Rp. 6.450.000.000.

Selanjutnya, tambah Arif, pemotong-

an pada Sekretariat Kabinet (Setkab) sebesar Rp. 14.583.008.000, “Jadi untuk APBN-P 2014 alokasi anggaran Setkab menjadi Rp. 170.999.229.000, dimana sebelumnya adalah Rp. 159.829.579.000,” jelas politisi dari PDI-Perjuangan ini.

Untuk Lembaga Administrasi Negara (LAN), terang Arif, dilakukan pemotongan sebesar Rp. 14,117 miliar, namun Komisi II DPR menyetujui usulan tambahan anggaran LAN tahun 2014 untuk kekurangan alokasi anggaran gaji dan tunjangan kinerja sebesar Rp. 9,341 miliar.

Selanjutnya, pemotongan alokasi anggaran tahun 2014 sebesar Rp. 40,693 miliar untuk Badan Kepegawaian Negara (BKN), Rp. 8,561 untuk Arsip Nasional RI (ANRI) dan Rp. 25,176 miliar untuk Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPB).

Di akhir kesimpulannya, lanjut Arif, Komisi II DPR memberikan catatan, yang meminta kepada Kemendagri untuk menyampaikan penjelasan secara rinci terkait pembatalan SK tentang alokasi APBN Tahun 2014 yang dianggarkan untuk program Kantor Desa dan Pasar Desa. (nt), foto riska/parle/hr.

Pemotongan Anggaran Tak Pengaruhi Angka Kunjungan Wisatawan

Pemotongan anggaran di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) tak berdampak signifikan terhadap angka kunjungan wisatawan asing ke Indonesia.

Dalam rapat kerja Komisi X DPR dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu, Senin (16/6), terungkap bahwa angka kunjungan wisatawan asing ke Indonesia pada periode Januari-April 2014 sebanyak 2.947.684 kunjungan. Dengan kata lain mengalami peningkatan sebesar 10,64% dibanding periode tahun 2013 sebanyak 2.664.176.

Kinerja yang baik di kuartal pertama tahun 2014 disebabkan oleh faktor-faktor seperti perbaikan infrastruktur dan peningkatan konektivitas penerbangan langsung termasuk perluasan *low cost carriers*, dan meningkatnya daya beli di kawasan Asia. Upaya promosi dan perbaikan destinasi wisata oleh Kemenparekraf juga telah meningkatkan angka kunjungan tersebut.

Wakil Ketua Komisi X DPR Utut Adianto (F-PDI Perjuangan) mengatakan, tidak ada dampak yang mempengaruhi secara khusus atas pemotongan anggaran ini. Pemotongan anggaran dilakukan hampir di semua Dirjen, baik Dirjen Pemasaran, Dirjen Ekonomi Kreatif, hingga Sekretariat Jenderal. "Nah, kalau kita lihat yang paling penting fokusnya tetap terjaga. Mereka melakukan pengurangan secara proposional saja, termasuk di *lead bank*," ungkap Utut.

Ditanya secara khusus soal dampak pemotongan, Utut mengakui, soal dampak memang ada, terutama menyangkut kebutuhan di kementerian. "Kalau pengaruh pasti ada, namanya juga dipotong. Tapi, ini situasi yang tidak bisa dihindarkan. Nah, kalau ditanya banyak *enggak*, ya saya rasa *enggak*," kata Utut.



Wakil Ketua Komisi X DPR Utut Adianto

Dalam rapat tersebut terungkap, pada tahun 2013, sektor ekonomi kreatif tumbuh 5,76% atau di atas laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,74%. Tahun 2013 kontribusi ekonomi kreatif terhadap perekonomian nasional mencapai Rp 641,8 triliun atau sebesar 7% terhadap PDB nasional. Laju pertumbuhan masing-masing sektor industri kreatif menunjukkan perkembangan yang menggembirakan dengan pertumbuhan di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi kreatif dan pertumbuhan nasional.

Adapun program-program strategis yang telah diselenggarakan sampai dengan akhir bulan Mei 2014, yaitu program Pengembangan Destinasi Pariwisata, Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya, Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, IPTEK, dan Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (mh,br), foto : naefurodjie/parle/hr.

Pemotongan Anggaran Akan Ganggu Target RPJMN

Pemotongan Anggaran pada APBN Tahun Anggaran 2014 di 86 Kementerian/Lembaga dapat berakibat berkurangnya capaian target RKP/Rencana Kerja Tahun 2014 baik prioritas nasional, bidang dan K/L, sehingga akan mengganggu target pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Renstra Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) 2010-2014.

"Tidak hanya itu, pemotongan anggaran akan dapat mengurangi kinerja pelayanan kepada masyarakat

maupun pelayanan internal kementerian," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR, Supriyatno saat Rapat Kerja dengan Menakertrans Muhaimin Iskandar dan jajarannya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/6).

Agenda rapat kerja membahas Pelaksanaan APBN 2014 dan Rencana Kerja Tahun 2015 tersebut, memutuskan Komisi IX DPR tidak menyetujui pemotongan anggaran Kemenakertrans sebesar Rp 558.917.562.000,- (12,36%) dari total alokasi anggaran sebesar Rp 4.520.846.173.000,- (14,56%)

dari total rupiah murni sebesar Rp3.839.218.959.000,-.

Selain hal tersebut, Komisi IX menyetujui penambahan anggaran Kemenakertrans sebesar Rp 5.268.942,3 juta dari Pagu Indikatif Kemnakertrans Tahun 2015 sebesar Rp 4.773.609,9 karena belum memadai untuk menangani isu-isu strategis ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

Supriyatno menyatakan, bahwa anggaran Kemenakertrans tidak hanya untuk TKI tapi untuk meningkatkan



produktifitas, meningkatkan lapangan kerja baru, dan lain sebagainya. “Jadi TKI itu sebenarnya bukan hal yang harus di prioritaskan, melainkan yang harus diprioritaskan adalah bagaimana menciptakan lapangan kerja baru di Indonesia,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemerintah harus menciptakan lapangan kerja baru, dengan target angkatan kerja yang bertambah sekitar 2,5 juta. Jika pemerintah tidak bisa mengejar target tersebut, maka semakin bertambahlah pengangguran.

“Target pertumbuhan ekonomi harus di genjot, jika pertumbuhan ekonomi kurang dari 7% maka pengangguran akan terus berjalan. Oleh sebab itu pemerintahan nantinya harus mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi lebih besar dari 7%,” lanjutnya dengan tegas.

Target pemerintah adalah menciptakan lapangan pekerjaan di dalam negeri, kata politisi Fraksi Gerindra. Indonesia masih memiliki banyak lahan yang dapat dimanfaatkan, persoalannya terbesarnya adalah pada masalah strategi. Apabila Malaysia memandang daerah belakang sebagai muka



Wakil Ketua Komisi IX DPR Supriyatno

atau pintu, sehingga mereka bangun perbatasan itu menjadi daerah yang produktif.

Sementara Indonesia menganggap daerah belakang hanyalah daerah belakang, tidak dibangun. Sehingga Malaysia membangun daerah perbatasan dengan luar biasa sementara Indonesia tidak dibangun apa-apa. Hal ini menyebabkan banyaknya tenaga kerja kita yang masuk ke Malaysia, dan mereka akhirnya lebih memilih Malaysia diban-

ding Indonesia, karena di Indonesia tidak merasa dimanusiakan, dan ini lah yang menjadi masalah,” ujar Supriyatno.

Harapan kedepannya untuk mengurangi penumpukan pengangguran akibat pergantian masa kerja adalah “Semoga dengan adanya pemerintahan baru dapat menggenjot pertumbuhan ekonomi sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan lebih banyak,” jelasnya. (sc/sfa), foto : naefu-rodjie/parle/hr.

DPR Setujui Penambahan Anggaran KPU dan Bawaslu

Komisi II DPR menyetujui penambahan anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tahun 2014 untuk keperluan mendesak (Pemilu 2014) yang bersumber dari realokasi dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara sebesar Rp 1.370 triliun untuk KPU dan Rp 757.559 miliar untuk Bawaslu.

Demikian isi salah satu kesimpulan yang dibacakan Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo saat RDP dengan KPU, Bawaslu, ORI dan BPN, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (16/6).

Selanjutnya, dalam rangka penghematan pemilu, Komisi II DPR tidak menyetujui pemotongan anggaran untuk KPU dan Bawaslu, dan meminta agar alokasi anggaran Tahun 2014 KPU sebesar Rp 15.410 triliun berubah menjadi Rp 16.780 triliun, dan anggaran Bawaslu sebesar Rp 3.261 triliun berubah menjadi Rp 4.019 triliun, pada APBN Perubahan Tahun 2014. (nt) foto:rizka/parle/hr.



Wakil Ketua Komisi II Arif Wibowo

Pemotongan Anggaran Jangan Ganggu Program Kemenpora

Kementerian Pemuda dan Olahraga menjadi salah satu kementerian yang mendapat amanat untuk memotong pagu anggaran di APBN 2014 ini. Walaupun Komisi X, sebagai mitra dari Kemenpora, menyetujui pemotongan anggaran ini, namun terdapat beberapa catatan yang menyertainya.

“Komisi X dan Kemenpora sepakat bahwa kebijakan pemotongan APBN 2014 mempertimbangkan beberapa hal. Pertama, mengupayakan untuk meminimalisir pemotongan terhadap program pembinaan olahraga prestasi. Kedua, pemotongan yang dilakukan tidak mengganggu program prioritas Kemenpora RI,” jelas Wakil Ketua Komisi X Utut Adianto saat membacakan kesimpulan rapat kerja Komisi X dengan Menpora Roy Suryo di Gedung Nusantara I, Senin (16/06).

Sebagaimana butir kesimpulan raker yang lain, Komisi X DPR RI menyetujui usulan terkait perubahan APBN 2014 Kemenpora menjadi sebesar Rp 1,82 triliun. Semula, pagu APBN 2014 Kemenpora sebesar Rp 1,881 triliun,



Wakil Ketua Komisi X Utut Adianto

kemudian mengalami pemotongan anggaran sebanyak Rp 60 miliar.

“Kemenpora ini kan *output*-nya perolehan medali. Jika anggaran dipotong, akan berpengaruh cukup besar. Harapan Komisi X, karena olahraga merupakan kebanggaan kita, semoga pemotongan anggaran ini tidak terlalu berpengaruh,” imbuh Politisi PDI Perjuangan ini.

Sebelumnya, Menpora Roy Suryo menjelaskan pihaknya mengajukan tiga formulasi pemotongan anggaran. Formulasi yang mendapat persetujuan dari Komisi X memiliki rincian pemotongan anggaran yang paling kecil, atau sebesar Rp 60 miliar. Pemotongan ini diberlakukan pada fungsi pendidikan dan fungsi pariwisata.

Pada fungsi pendidikan, pemotongan anggaran pada program kepemudaan dan keolahragaan, dari anggaran sebesar Rp 1,103 triliun, dipotong sebanyak Rp 20 miliar, sehingga menjadi 1,083 triliun. Sedangkan pada fungsi pariwisata dan ekonomi kreatif, dari anggaran sebesar Rp 494 miliar, dipotong sebanyak Rp 40 miliar, sehingga menjadi Rp 454 miliar.

“Seminimal mungkin kami melakukan pemotongan yang terkait dengan prestasi atlet. Misalnya, untuk anggaran penyelenggaraan event olahraga, dapat dipotong. Namun, anggaran untuk pelatihan atlet, tidak bisa dipotong,” jelas Menpora Roy Suryo. *(sf,zah) /foto:odjie/parle/hr.*

Komisi IV DPR Minta Pertahankan Program Kerakyatan

Komisi IV DPR RI menyetujui rencana pemotongan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2014 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebesar Rp 772,8 miliar atau 11,9%, sehingga pagu APBN Perubahan Tahun 2014 Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi Rp 5.748.673.798.000.

“Terkait rencana pemotongan APBN Tahun 2014, Komisi IV meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan tetap mempertahankan program-program kerakyatan untuk dijadikan prioritas dalam realisasi program dan kegiatan Kementerian Kelautan dan Perikanan,” kata Ketua Komisi IV M. Romahurmuziy.

Pada Rapat Kerja, Komisi IV dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif Cicip Sutardjo, di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (16/6), membahas perubahan RKA-KL RUU Perubahan APBN Tahun Anggaran 2014, Pelaksanaan dan Penyerapan APBN 2014 semester I, dan Pembahasan RKP K/L dan RKA-K/L 2015.

Dari total target penghematan sebesar Rp 772,8 miliar, dua diantaranya dinilai adalah program yang berdampak langsung terhadap rakyat. Dua program tersebut adalah penghematan anggaran Pengembangan Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya.

Pada program penghematan anggaran Pengembangan Pengelolaan Perikanan Tangkap ini, dengan target penghematan sebesar Rp 300 miliar, menyebabkan tertundanya lanjutan pembangunan beberapa pelabuhan perikanan, menurunnya serapan tenaga kerja akibat tertundanya pembangunan pelabuhan perikanan serta pembangunan kapal perikanan, berkurangnya kegiatan pembinaan pemberdayaan masyarakat (bimbingan teknis, fasilitas akses permodalan, diversifikasi usaha, pembinaan KUB), berkurangnya nelayan anggota KUB calon penerima PUMP dan kapal perikanan.

Sedangkan penghematan anggaran dengan target sebesar Rp 159,9 miliar



pada program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya, menyebabkan perubahan target kinerja yang berefek, menurunnya jumlah kawasan budidaya yang memiliki sarana dan prasarana yang memadai di kawasan budidaya air payau dari 123 menjadi 121 kawasan dan kawasan budidaya air tawar dari 202 menjadi 200 kawasan, menurunnya unit cost BLM Pokdakan penerima PUMP-PB dari Rp 65 juta menjadi Rp 35 juta per Pokdakan, menurunnya jumlah jenis pakan yang terdaftar dari 800 jenis menjadi 760 jenis.

Walaupun demikian pemotongan anggaran tersebut mendapatkan berbagai tanggapan dan masukan dari anggota Komisi yang membidangi Pangan ini.

Menurut Hermanto, dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan ada kaitannya dengan soal pangan, dan diharapkan agar sektor ini bisa menjadi bagian untuk menjaga stabilitas pasokan pangan.



Ketua Komisi IV DPR M. Romahurmuziy

“Soal penghematan saya melihat bahwa penghematan ini tidak saja berdampak pada kementerian tapi perlu juga kita mempertimbangkan faktor-faktor yang ada implikasinya kepada masyarakat,” kata Hermanto.

Disamping itu, Darizal Basir dari Fraksi Partai Demokrat, juga berkesempatan memberi tanggapan soal

hal yang terkait itu. Dikatakannya penghematan anggaran ini memang sesuatu yang tidak bisa kita hindari, karena tidak tercapainya asumsi makro. “Pengurangan anggaran oleh kementerian hendaknya dilakukan kepada sektor belanja pemerintah,” katanya.

Selain itu, patut diketahui, pada raker tersebut Komisi IV DPR RI menerima laporan dan memberikan apresiasi atas serapan APBN Kementerian Kelautan dan Perikanan sampai dengan bulan Juni 2014 sebesar Rp 1,58 triliun atau 20,43% dari pagu APBN Tahun 2014 sebesar Rp 6,5 triliun.

Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan kinerja agar serapan APBN Tahun 2014 dapat tercapai sesuai dengan rencana dan target. Dan Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas Pagu Indikatif RAPBN Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 sebesar Rp 6,368 triliun. (as/mf/sr), foto : naefurodjie/parle/hr.

Pemotongan Anggaran Bahayakan Penegakan Hukum

Anggota Komisi III DPR RI Martin Hutabarat mengkhawatirkan kebijakan pemotongan anggaran pada seluruh kementerian dan lembaga negara membahayakan upaya penegakan hukum. Pasalnya sejumlah program yang sudah dipersiapkan bisa *mandeg* karena tidak didukung anggaran yang memadai.

“Anggaran itu sudah disetujui dan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan sehingga kalau harus dipotong begitu banyak, pertanyaannya apakah kinerja penegakan hukum bisa benar,” katanya saat rapat di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (17/6/14).

Ia menyebut sejumlah persoalan besar yang selama ini muncul, terbentur masalah kekurangan anggaran seperti pembangunan lapas kapasitasnya sudah melebihi sampai 100 persen, pembangunan panti rehabilitasi narkoba, pemberantasan korupsi terutama terkait penerimaan negara disektor sumber daya alam dan energi.



Anggota Komisi III DPR Kurdi Mukri

Sementara itu anggota Komisi III dari FPPP Kurdi Mukri menyebut pangkal masalah pemotongan ini adalah kebocoran anggaran terutama subsidi BBM yang nilainya ratusan triliun. Ini menurutnya mempengaruhi penerimaan negara. “Subsidi bahan BBM yang seharusnya untuk masyarakat umum banyak bocornya, diseludup-

kan. Seharusnya ini bisa diatasi dan Polri dan KPK. Saya khawatir ini membuat aparat tidak efektif,” tuturnya.

Dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III Al Muzammil Yusuf, sejumlah masukan mengemuka diantaranya dari Wakil Ketua KPK Bambang Widjoyanto. Ia menjelaskan dampak pemotongan anggaran akan mempengaruhi sejumlah program diantaranya pencegahan kebocoran yang dapat meningkatkan penerimaan negara.

Program itu diantaranya pengembangan *freud control* untuk membangun budaya anti korupsi di kementerian dan lembaga negara, peninjauan 70-an kontrak karya di bidang pertambangan yang memiliki potensi penerimaan negara cukup besar.

“Info dari Dirjen Pajak peningkatan penerimaan negara dari sumber daya alam hutan dan batu bara sejak KPK masuk di 7 provinsi mencapai 300

persen. Diharapkan kalau dana masih ada upaya KPK bersama teman-teman 12 kementerian lain akan bisa meningkatkan revenue dari pajak sampai 500 persen,” paparnya.

Sementara itu Kepala BNN yang juga hadir dalam rapat menjelaskan pemotongan anggaran jelas mempengaruhi

institusi yang dipimpinnya. Namun ia berupaya kebijakan pemotongan tidak mempengaruhi agenda utama mewujudkan Asean Bebas Narkoba 2015.

Pimpinan sidang AI Muzammil Yusuf memutuskan Komisi III perlu mendingar sikap resmi seluruh fraksi menyikapi Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun

2014 tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014. “Hasilnya terutama terkait mitra kerja kita akan kita sampaikan kepada Badan Anggaran,” kata dia. (iky), foto : andri/parle/hr.

Baleg Terima Masukan RUU Kebudayaan

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR (Baleg), Sunardi Ayub, Selasa (17/6) menerima masukan RUU tentang Kebudayaan dari Koalisi Seni Indonesia di Gedung DPR RI, Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Koalisi Seni Indonesia, M. Abduh Aziz menyatakan bahwa masukan yang disampaikan Koalisi Seni Indonesia sebagai wujud aspirasi masyarakat.

Menurutnya, masa depan pengembangan seni dan budaya di Indonesia dengan cita-cita besar untuk membentuk sebuah lingkungan seni budaya yang kondusif. Karena keragaman budaya Indonesia memiliki potensi besar sebagai aset negara.

Abduh menjelaskan tentang Paradigma dan Lingkup Pengelolaan Kebudayaan. Dengan fenomena globalisasi yang intensif saat ini, kebudayaan Indonesia berpeluang untuk tumbuh dinamis dalam perkembangannya, dan bersikap aktif untuk mengembangkan kebudayaan dunia bersama dengan bangsa yang lain.

“Setidaknya kita harus memastikan bahwa pergaulan antar-budaya akan semakin intensif di masa mendatang untuk mengembangkan kreativitas pada setiap individu dan kebudayaan dalam wilayah Republik Indonesia,” ujarnya.

“Isi dari RUU Kebudayaan harus terbuka pada bentuk-bentuk perkembangan dan tidak sekedar berisi pembatasan-pembatasan hanya karena sikap defensif terhadap keadaan yang dipengaruhi oleh globalisasi” tambah Abduh.

Selanjutnya, Abduh mengatakan bahwa peran pemerintah yang dominan berpotensi melumpuhkan inisiatif mandiri dari masyarakat dan cenderung terperangkap dalam pola penyeragaman, seperti yang terjadi pada masa orde baru.

Abduh menyatakan bahwa RUU Kebudayaan tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia saat ini, karena terintegritasnya sistem pendidikan nasional, pengelola kebudayaan, dan pengembangan industri kreatif.



Wakil Ketua Baleg DPR Sunardi Ayub

Dirinya merasa ada ketidakefisienan dan tumpang tindih pekerjaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Terlalu besarnya cakupan bidang pendidikan yang dikelola Kemendikbud serta bidang pariwisata yang sesungguhnya lebih tepat dan lebih memudahkan perencanaan yang terpadu.

Lebih lanjut Abduh mengatakan bahwa pembuatan RUU Kebudayaan melibatkan partisipasi masyarakat yang cukup luas yang terlibat secara aktif pada proses penyusunan dan pembahasannya.

Terkait masukan RUU Kebudayaan tersebut, Sunardi Ayub menilai bahwa penjelasan yang disampaikan Koalisi Seni Indonesia terlalu panjang hingga melebar jauh dari topik yang dibicarakan.

Sunardi menginginkan agar pembahasan RUU Kebudayaan ini dilakukan terlebih dahulu secara intensif dengan melibatkan para pemangku kepentingan utama, akademis, serta budayawan dalam suasana yang tidak tergesa-gesa agar menghasilkan jawaban yang sesuai bagi kebutuhan masyarakat untuk perkembangan di masa datang. (sc/sfa), foto : riska/parle/hr.

Komisi V DPR Janji Pertahankan Program PPIP

Komisi V DPR berjanji akan mempertahankan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 1.05 Triliun. Peralnya, melalui PPIP diharapkan dapat mewujudkan peningkatan akses masyarakat miskin kepada pelayanan infrastruktur dasar pemukiman pedesaan.

“Kita di Banggar juga telah berjuang untuk mempertahankan program PPIP agar terhindar dari pemotongan anggaran,” ujar Anggota Banggar Fary Djemy Francis dari Gerindra yang juga anggota Komisi V DPR, saat Raker dengan seluruh mitra kerja Komisi, di Gedung Nusantara, Senin, (16/6).

Menurutnya, program PPIP merupakan salah satu program unggulan Komisi V DPR untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap infrastruktur dasar di pedesaan.

Dia mengatakan, Komisi V DPR harus segera melakukan pemetaan terhadap program apa saja yang merupakan belanja modal dan barang. “Kita di Banggar telah memberikan persetujuan agar belanja modal tidak dipotong,” ujarnya.

Sementara Wakil Ketua Komisi V DPR Muhidin M. Said mengatakan, APBN sangat punya resiko terhadap pemotongan tersebut, karena itu perlu ada alternatif diantaranya



Anggota Banggar Fary Djemy Francis

jangkan melakukan pemotongan terhadap belanja modal kecuali ada masalah krusial atau faktor X. “Banggar telah memberikan catatan terhadap belanja modal tersebut, dan disepakati APBN-P tidak melakukan pemotongan belanja modal,”katanya. (Sugeng Irianto), foto : riska/parle/hr.

Komisi IX DPR Tidak Setuju Pemotongan Anggaran Kemenkes

Komisi IX DPR RI tidak menyetujui pemotongan anggaran Kementerian Kesehatan RI dalam APBN Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp2.349.559.778.

Hal tersebut merupakan kesimpulan Rapat Kerja Komisi IX dengan Menteri Kesehatan RI, Nafsiah Mboi yang disampaikan Ketua Rapat, Irgan Chairul Mahfiz di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (16/6)

Menurut Anggota Komisi IX, Hernani Hurustiati (F-PG), dengan pemotongan anggaran bisa berakibat kerja dari Kementerian Kesehatan menjadi tidak maksimal.

Sementara, lanjut Hernani, tahun 2015 kita menghadapi kesepakatan MDGs dimana akan dinilai oleh dunia. Dengan kondisi seperti ini, dirinya



Anggota Komisi IX DPR Hernani Hurustiati

khawatir target-target MDGs ini tidak bisa dituntaskan oleh Kementerian Kesehatan.

“Dengan kondisi seperti ini, dengan pemotongan anggaran, apalagi yang

dipotong ini hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan tupoksi Kementerian Kesehatan, saya lihat anggaran untuk optimalisasi juga dikurangi, Bagaimana mencapai target apa yang ditargetkan oleh kementerian,” papar Hernani.

Dalam rapat kerja Komisi IX yang dihadiri Menteri Kesehatan dan jajarannya ini, Komisi IX juga memutuskan menyetujui penambahan anggaran Kementerian Kesehatan sebesar Rp 3.367.000.000 untuk keperluan mendesak dan realokasi dari BA BUN (kekurangan Jamkesmas 2013). Dan apabila dari hasil audit BPK masih ada kekurangan, maka akan dialokasikan dalam APBN Tahun 2015.

Sebelumnya dalam kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Naf-

siah Mboi menyampaikan alokasi anggaran Kementerian Kesehatan sebesar Rp46.49.033.461.000 dimana didalamnya termasuk tambahan anggaran optimalisasi sebesar Rp1,6 Triliun.

“Dan berdasarkan surat Menkeu tanggal 14 Juni 2014 tentang perubahan pagu anggaran belanja Kementerian/Lembaga dalam APBN-P Tahun Anggaran 2014, anggaran Kementerian Kesehatan tahun 2014 dipotong sebesar Rp 2.349.559.778,” kata Nafsiah.

“Tambahan untuk keperluan mendesak dan realokasi dari BA BUN (kekurangan jamkesmas 2013) sebesar Rp 3.367.000.000.000,” tambah Nafsiah.

Akibat dari pemotongan tersebut, Kemenkes melakukan berbagai efisien-

si anggaran per program. Dimana dari efisiensi ini mengakibatkan tidak semua supply side yang direncanakan untuk mendukung program JKN dapat terpenuhi, sehingga harus dialihkan pada perencanaan tahun 2015.

“Sebagian pembangunan fisik rumah sakit dan Puskesmas tidak dapat terpenuhi mengingat sisa waktu yang terbatas,” jelas Menkes.

Disampaikan Nafsiah, bahwa hutang Jamkesmas tahun 2013 terdiri dari pelayanan rujukan dan pelayanan dasar. Adapun kekurangan Jamkesmas pelayanan rujukan untuk 996 RS/RSUD berdasarkan hasil audit BPKP adalah sebesar Rp 3.148.372.436.736.

Selanjutnya, kekurangan Jamkesmas pelayanan dasar di puskesmas pada 298 Kabupaten/Kota sebesar Rp

232.959.552.140.

Dengan demikian total jumlah kekurangan pembayaran Jamkesmas tahun 2013 yang diajukan adalah sebesar Rp 3.381.331.988.876.

“Anggaran yang diberikan berdasarkan Surat Menteri Keuangan sebesar Rp 3.367.000.000.000, sehingga dengan demikian masih terdapat kekurangan sebesar Rp 14.331.998.876,” imbuh Nafsiah.

Dengan kekurangan anggaran tersebut, kata Menkes, maka sesuai hasil audit BPKP prioritas alokasi dilakukan terlebih dahulu untuk menutup kekurangan anggaran Jamkesmas Rujukan (rumah sakit), baru sisanya ke Jamkesmas Dasar (puskesmas). (sc/sfa)
foto:iwan armanias/parle/hr.

DPR Setuju Pembahasan RUU HKPD

Fraksi-fraksi DPR menyatakan persetujuannya membahas Rancangan Undang-undang Hubungan Keuangan Pusat Daerah (RUU HKPD) sebagai revisi UU No.33/2004 yang diusulkan Pemerintah. Persetujuan disampaikan jubi Fraksi Partai Demokrat Achsanul Qosasi, Hetifah dari FPG, FPD Perjuangan oleh Yasonna H. Laoly dan Fraksi PKS oleh Ecky Awal Mucharam, dari FPP AW. Thalib serta dari F PAN Mohammad Hatta.

Dalam rapat Pansus RUU HKPD yang dipimpin Ketua Pansus Mohammad Hatta (F PAN) didampingi Wakil Ketua Murady Darmansyah (F Hanura) Senin (16/6), di ruang Pansus C Gedung DPR Senayan, Jakarta. Hadir Menteri Keuangan Chatib Basri dan Wakil dari Menkom HAM serta wakil dari DPD Abdul Gafar, Cholid Mahmud dan Irma Suryani.

Achsanul Qosasi dari FPD menyatakan tanpa kehadiran RUU ini dikhawatirkan daerah bisa mengalami kebingungan. Sebagai contoh kasus mobil pemadam kebakaran (damkar), akhirnya aparat di daerah berhubungan dengan hukum. Pasalnya memakai rezim yang diberikan Kemendagri yang tidak sesuai dilakukan oleh Kemenkeu.

Selain itu, lanjutnya, penggalan potensi ekonomi daerah cukup dominan dalam RUU ini, mengatur tentang tanggung jawab dan hak yang jelas, terutama tentang DAU dan DAK.

Hetifah dari FPG menyatakan, pembahasan perubahan UU No.33/2004 terlihat bergeser dari sekedar fokus pada kebijakan dan teknis transfer dana APBN ke APBD menjadi fokus pada tujuan pengendalian dan kesehatan fiskal daerah. Dalam draft tersebut terdapat syarat fiskal dimana terkait keuangan daerah dan potensi ekonomi daerah.



Ketua Pansus HKPD Mohammad Hatta menerima Pandangan Fraksi F-PG

Yasonna Laoly dari Fraksi PDI Perjuangan mengatakan, saat inilah kita harus memikirkan satu rumusan yang adil dalam mempercepat dan menghilangkan kesenjangan antar daerah. Hanya dengan intervensi APBN daerah tertinggal dan termiskin akan bisa mengejar, atau mendekati kemajuan daerah lain.

Sedangkan AW Thalib dari FPP menyadari pelaksanaan desentralisasi fiskal selama ini yang diatur dalam UU 33/2004 belum memenuhi harapan banyak pihak. Dengan demikian Fraksinya menyatakan setuju untuk membahas revisi UU tersebut dengan harapan harus komprehensif, berdimensi jangka panjang sehingga hasilnya benar-benar mampu meningkatkan kinerja keuangan daerah.

“Kita akui peningkatan kinerja keuangan daerah selama ini menjadi masalah serius. Ditandai dengan ketimpangan fiskal antar daerah, kualitas pelayanan publik yang belum memuaskan serta kualitas belanja daerah yang belum optimal,” tegasnya.

Murady Darmansyah dari Fraksi Hanura menyatakan sikap yang sama, perlu penguatan di masa datang terutama dalam membangun sistem pusat dan daerah khususnya dalam membangun pendapatan daerah atau kebijakan fiskal. Selain itu perlu formula yang rasional dalam kita menempatkan anggaran untuk Pemda.

Pandangan FPKS melalui jubirnya Ecky Awal Mucharam menghargai Pemerintah yang menyampaikan RUU ini dan setuju untuk melakukan pembahasan bersama pemerintah. Namun tidak harus selalu tergesa-gesa memutuskan dan menuangkan buah pikiran dalam RUU ini.

“Saya kira RUU ini akan kita bahas secara natural saja. Ini merupakan keseriusan dan kerja keras dalam menyelesaikan RUU ini untuk kepentingan bangsa ke depan,” ungkap Ketua Pansus M. Hatta menutup rapat. (mp,zah)/
foto:iwan armanias/parle/hr.

Komisi III Nilai Upaya Damai di Morotai Masih Terbuka

Komisi III DPR RI menemukan fakta kedua pihak yang bertikai di Kabupaten Morotai, Maluku Utara yaitu Muspida bersama masyarakat dan perusahaan investasi di bidang perikanan PT. Morotai Marine Culture (MMC) masih sama-sama menginginkan perdamaian. Walaupun proses hukum sudah berjalan tetapi demi kemaslahatan semua pihak upaya rujuk patut dibuka kembali.

“Memperhatikan berkas yang sudah diproses hasilnya adalah menang jadi arang, kalah jadi abu. Kita sudah mendengar kedua pihak semua ingin rujuk tapi kok selalu gagal berarti ditengah pihak ini ada setannya yang tidak ingin kedua pihak rujuk, ada yg bermain ditengah perkara ini. Kami gembira kalau kedatangan kami ini tidak sia-sia, upaya perdamaian patut dibuka kembali. Kita ingin melihat kemanfaatan yang lebih besar dari masyarakat banyak,” kata Ketua Tim Kunjungan Spesifik Komisi III Al Muzammil Yusuf saat bertemu Kapolda Malut dan jajarannya di Ternate, Malut, Kamis (12/6/14).

Ia menyebut telah berbicara Gubernur Malut yang kemudian menyanggupi membuka kembali perdamaian. Semua pihak perlu jernih melihat dukungan masyarakat kepada kepala daerah mereka yang dianggap telah melakukan upaya penegakan kewenangan di wilayah tersebut. Pilihan Komisi III ini menurutnya sejalan dengan rekomendasi yang pernah disampaikan Komnas HAM.

Bicara pada kesempatan yang sama



Wakil Ketua Komisi III DPR Al Muzammil Yusuf saat diwawancara wartawan

anggota Tim Kunjungan Spesifik dari FPD Ruhut Sitompul meminta kepolisian berhati-hati dalam menyikapi sengketa di wilayah yang langsung berhadapan dengan Samudera Pasifik dan berbatasan dengan sejumlah negara ini. Baginya kasus hukum ini persoalan besar tapi kalau bisa dicegah untuk kepentingan yang lebih besar kenapa tidak.

“Saya terenyuh mendengar pengaduan masyarakat kalau polisi mengambil bupati kami, maka kami pilih merdeka. Kita sedih melihat video anarkisme oleh Satpol PP dan masyarakat di PT MMC tapi mereka juga menyampaikan waktu kami pertama kali datang ke PT MMC kemudian dilempari kok tidak

di-videokan juga? Jadi kalau ada *win-win solution* mungkin itu lebih baik,” tuturnya.

Menanggapi hal ini Kapolda Maluku Utara Brigjen Pol. Drs. Sobri Effendi Surya menjelaskan upaya mendamaikan para pihak sudah dilakukan beberapa kali namun kandas. Namun ia mengaku siap menindaklanjuti setiap perkembangan baru apalagi kalau melibatkan Gubernur Malut.

“Kami sependapat, peran gubernur menentukan dalam kasus ini. Pak Gub bisa memfasilitasi dan panggil kedua pihak, saya siap apapun keputusan mereka berdua. Bupati mencabut laporan, PT MMC juga mencabut laporan

kasus ini akan kita hentikan. Dengan catatan kami tidak bisa mencampuri masalah perdata dan PTUN-nya,” papar Kapolda.

Kunjungan Tim Spesifik Komisi III ke Provinsi Maluku Utara sebagai respon dari pengaduan masyarakat yang meminta komisi hukum mengambil langkah pasca sengketa yang bermuara pada aksi anarkisme di PT MMC. Per-

usaha investasi dibidang perikanan ini dinilai menyalahi sejumlah aturan sehingga DPRD Kabupaten Morotai merekomendasikan kepada Bupati untuk mencabut izinnya.

Namun upaya ini berakhir kisruh, upaya Wakil Bupati bersama Satpol PP yang datang ke lokasi perusahaan di Pulau Ngele-ngele Besar menegakkan SK Penghentian Sementara rusuh.

Sejumlah masyarakat yang ikut mendukung SK Bupati ini diduga membuat penertiban menjadi anarkis. Dalam perkembangannya PT. MMC yang maju ke jalur hukum memenangkan perkara di PTUN. Sedangkan pada kasus pidana kedua belah pihak saling menuntut. Polda saat ini telah menindaklanjuti dan menetapkan Bupati, Wakil Bupati dan sejumlah pimpinan PT MMC sebagai tersangka. (iky) foto: ical/parle/hr.

UU Polri Harus Perkuat Kinerja Kepolisian

Semangat dari pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah memperkuat kinerja Polri dalam melayani dan mengayomi masyarakat.

Demikian mengemuka dalam pertemuan Badan Legislasi (Baleg) DPR dengan Gubernur Provinsi Bali I Made Mangku Pastika, Kapolda Prov. Bali Albertus Julius Benny Mokalu dan seluruh unsur Muspida Provinsi Bali, di Provinsi Bali, baru-baru ini.

Pertemuan Baleg DPR dengan Muspida Provinsi Bali itu sendiri dalam rangka mendapatkan masukan terhadap materi muatan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang Polri.

Wakil Ketua Baleg DPR Abdul Kadir Karding (FPKB) selaku Ketua Tim kunjungan kerja mengatakan selama 12 tahun banyak ditemukan hal yang perlu disempurnakan dari UU No. 2 Tahun 2002.

“Keberadaan UU ini sudah 12 tahun. Dengan dinamika masyarakat yang tentunya sudah berbeda serta arus tuntutan kerja yang berubah, kami berpandangan perlu ada perbaikan dan perubahan atas UU ini sesuai dengan perkembangan di lapangan terutama faktor personalnya dan paradigmanya,” kata Abdul Kadir Karding.

Politisi dari PKB itu mengungkapkan, ada beberapa isu strategis yang akan di bahas dalam perubahan UU



Wakil Ketua Baleg Abdul Kadir Karding berjabat tangan dengan Kapolda Bali

tersebut, diantaranya soal tugas dan kewenangan Polri dalam menjaga dan menjamin ketertiban di masyarakat. “Tugas seperti ini harus tegas dan jelas, selain tugas Polri sebagai pengayom dan pelayan masyarakat,” ujarnya.

Di samping itu, perubahan UU Polri itu nantinya juga akan lebih menitikberatkan pada penguatan sumber daya manusia personil Polri, terutama pada pola rekrutmen, sistem pendidikan dan pola pelatihan personil Polri. “Selain peningkatan anggaran kesejahteraan kepolisian,” katanya.

Abdul Kadir Karding menambahkan, salah satu materi muatan perubahan UU ini juga akan memperkuat postur Polri di tingkat Polsek, Polres, Polda. “Dalam hal ini kita ingin memenuhi formasi kebutuhan Polri, termasuk jenjang karir dan biaya operasionalnya,” jelasnya.

Perbaikan mekanisme pengangkatan Kapolri, kata Abdul Kadir Karding juga menjadi bagian dari materi UU Polri ini termasuk serta pengawasan internal dan eksternal Polri.

Sementara itu Gubernur Provinsi Bali I Made Mangku Pastika berharap revisi UU ini harus memperkuat Polri agar bisa mawadahi permasalahan yang semakin kompleks dan mempung segala kemungkinan yang dapat terjadi di masyarakat.

Dalam masukannya ke Baleg DPR, Gubernur I Made Mangku Pastika yang merupakan purnawirawan Polri itu menyatakan ada beberapa hal yang harus direvisi yakni pertama, masalah pengendalian diskresi kepolisian agar ditingkatkan sehingga Polri bisa maksimal dalam memelihara ketertiban, menegakkan hukum atau melindungi masyarakat.

Kedua, masalah melibatkan orang luar seperti TNI, Pemerintah Daerah (Pemda) maupun Pemerintah Provinsi (Pemprov), kata dia, dalam penyelesaian masalah dalam masyarakat agar dimasukkan ke dalam UU.

“Polisi tidak mungkin bekerja sendiri, harus ada TNI ataupun pemerintah daerah yang membantu, ini harus dibuatkan payung hukum tidak cukup hanya dengan juklak maupun juknis sehingga bisa memberikan payung keamanan pada anggota Polri” pungkasnya.

Di samping itu, mengenai kesejahteraan anggota Polri, kata Gubernur I

Made Mangku Pastika, agar diperhatikan mengingat menjadi anggota Polri bukan pekerjaan yang gampang, tidak mengenal waktu, tempat serta harus merelakan waktu bersama keluarga.

Selain itu beranjak dari pengalamannya sebagai penyidik Bom Bali

pada Tahun 2002, I Made Mangku Pastika berharap hendaknya biaya operasional kasus-kasus kepolisian harus diatur dan dipertimbangkan agar bisa memperlancar penyelesaian kasus tersebut.

Kunjungan Kerja Baleg ke Prov. Bali

dikuti juga oleh Dimiyati Natakusumah, Sunardi Ayub, Didi Irawadi Syamsuddin, Hari Kartana, Edi Sadeli, Arif Wibowo, Honing Sanny, Hendrawan Supratikno, Buchori Yusuf, A. Muhajir, Taslim, Muhammad Unais Ali Hisyam, dan Martin Hutabarat. (nt)/foto:nita/parle/hr.

Posisi Polri Di Bawah Kementerian Masih Jadi Perdebatan

Salah satu rumusan yang menjadi perdebatan pada Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah posisi Polri yang saat ini berada langsung di bawah Presiden, atau apakah nantinya Polri berada di bawah garis kementerian.

Gubernur Provinsi Bali I Made Mangku Pastika yang juga merupakan Purnawirawan Polri itu berharap hendaknya Polri tetap berada di bawah Presiden sebagai kepala negara, agar tidak terkontaminasi dengan unsur politik.

Hal itu disampaikan Gubernur Mangku Pastika di Bali, baru-baru ini, saat menerima kunjungan Badan Legislasi (Baleg) DPR dalam rangka mendapatkan masukan terhadap materi muatan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang Polri.

Gubernur Mangku Pastika juga berharap agar Baleg tidak tergesa-gesa dalam melakukan revisi terhadap UU ini. "Perlu pemikiran yang panjang serta banyak ahli Polri yang harus dilibatkan, minta masukan banyak pihak terutama purnawirawan Polri agar hasil revisi UU ini sesuai harapan bersama," pungkasnya.

Sementara itu, Kapolda Provinsi Bali, Irjen Polisi, Albertus Julius Benny Mokalau menyatakan hendaknya Polri tetap berada di bawah naungan Presiden sebagai kepala negara.

Ia berharap hendaknya revisi UU ini akan menyangkut aspek perlindungan bagi Polri dalam melayani masyarakat. "Polisi itu bekerja tidak berdasarkan kinerja, tidak mengenal waktu, beban kita berat agar bisa dipercaya lagi oleh masyarakat, karena saat ini masyarakat cenderung mempercayakan keamanannya pada ormas-ormas", ujarnya.

Sementara itu, Anggota Baleg DPR Sunardi Ayub (Fraksi Hanura) meminta agar semua pihak menghilangkan anggapan bahwa perubahan UU ini nantinya akan berdampak pada penguatan atau pelemahan institusi Polri.

"Kami (DPR-red) tegaskan, KPK lahir dari lemahnya kinerja polisi dan jaksa. Tentunya UU ini lahir untuk mengem-



Wakil Ketua Baleg Sunardi Ayub didampingi Abdul Kadir Karding saat pertemuan dengan Gubernur Bali dan jajarannya

balikan marwah kepolisian agar mempunyai kinerja yang lebih baik," kata Sunardi Ayub.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua Baleg DPR Abdul Kadir Karding (F-PKB) menjelaskan UU No 2 Tahun 2002 tentang Polri menjadi dasar pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memuat pokok-pokok mengenai tujuan, kedudukan, peranan dan tugas serta pembinaan profesionalisme kepolisian.

Namun seiring perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, serta perkembangan zaman yang kompleks, sehingga dipandang perlu untuk diadakan revisi terhadap UU yang telah berlaku selama 12 tahun tersebut.

Kunjungan Kerja Baleg ke Prov. Bali di Pimpin oleh Wakil Ketua Baleg Abdul Kadir Karding, diikuti juga oleh Dimiyati Natakusumah, Sunardi Ayub, Didi Irawadi Syamsuddin, Hari Kartana, Edi Sadeli, Arif Wibowo, Honing Sanny, Hendrawan Supratikno, Buchori Yusuf, A. Muhajir, Taslim, Muhammad Unais Ali Hisyam, dan Martin Hutabarat. (nt)/foto:nita/parle/hr.

Mengkhawatirkan Bila Kekayaan BUMN Dipisahkan

Kekayaan Rp 3.000 triliun dari BUMN harus menjadi kekayaan negara yang tak boleh dipisahkan dari keuangan negara dengan alasan apa pun. Yang dipisahkan adalah pengelolannya bukan kepemilikannya.

Demikian mengemuka dalam pembahasan Pansus RUU Keuangan Negara yang dipimpin Wakil Ketua Pansus Dimiyati Natakusumah (F-PPP), Kamis (12/6). Rapat menghadirkan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hasan Bisri. Dalam rapat tersebut, anggota Pansus meminta banyak masukan dari BPK soal pengelolaan keuangan negara.

Hal yang menarik adalah pembahasan soal kekayaan BUMN yang sempat diusulkan untuk dipisahkan dari kekayaan negara oleh para Direksi BUMN lewat *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi (MK). RUU Keuangan Negara yang sedang dibahas ini harus memberi rumusan yang jelas menyangkut kekayaan BUMN. BPK tidak setuju



Wakil Ketua Pansus RUU Keuangan Negara Dimiyati Natakusumah

bila BUMN memisahkan kekayaannya dari kepemilikan negara, yang berarti terbebas dari pengawasan negara.

Menurut Hasan Bisri, bila para Direksi BUMN merasa tidak leluasa mengelola usahanya, sebaiknya UU BUMN yang direvisi, bukan lantas memisahkan kekayaannya. Pandangan ini diapresiasi oleh pimpinan dan para anggota yang hadir. Angka kekayaan

BUMN yang fantastis hingga mencapai Rp 3.000 triliun sangat menggoda direksi untuk sepenuhnya menguasai aset kekayaan tersebut.

Topik lain yang juga menarik untuk dibahas dalam RUU ini adalah soal pengelolaan keuangan oleh badan hukum yang dibiayai negara. Selain itu, dibahas pula soal SKK Migas yang tak mau dibiayai oleh APBN. BPK sebenarnya sudah tiga kali menyurati Menkeu agar SKK Migas dibiayai lewat APBN. Tapi, tak pernah direspon. Semua ini harus masuk dalam rumusan RUU Keuangan Negara.

Topik lain yang tak kalah pentingnya adalah soal pinjaman yang dilakukan oleh Pemda ke pihak asing. Sebaiknya Pemda dilarang meminjam langsung ke pihak asing, karena pasti yang disorot oleh asing bukan Pemdanya, tapi pemerintah Indonesia sebagai pemegang. Topik ini tak boleh dilewatkan dalam rumusan RUU Keuangan.

(mh,br)/foto:iwan armanias/parle/hr.

Debat Capres Sangat Pengaruhi Suara Rakyat



Forum Dialektika Demokrasi menghadirkan Tjipta Lesmana, Irman Putrasidin, Fachry Hamzah dan Maruarar Sirait

Pakar Komunikasi Politik UI Tjipta Lesmana mengatakan bahwa debat Capres dan Cawapres itu akan sangat mempengaruhi suara rakyat dan mereka harus benar-benar memanfaatkan forum debat itu semaksimal mungkin.

Demikian mengemuka dalam forum Dialektika Demokrasi dengan mengambil tema 'Efektifitas Debat Capres Pengaruhi Pemilih' di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (12/6). Forum dihadiri juga oleh Pakar Hukum Tata Negara Irman Putrasidin, Fachry Hamzah dan Maruarar Sirait.

Namun menurut Tjipta, dari segi komunikasi politik debat capres itu kurang baik, tapi kalau sudah diatur UU tinggal mengikuti saja, "Meski debat itu kurang terbuka, dan antarcapres tidak bisa saling menggali pemikiran dan konsep masing-masing jika terpilih menjadi presiden dalam mengelola negara yang besar ini, dan kalau UU debatnya seperti itu, ya ikuti saja," tambahnya.

Ditempat yang sama, terkait debat capres dan cawapres beberapa waktu lalu, Pakar Hukum Tata Negara Irman Putrasidin menyayangkan sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengabaikan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam debat capres sekarang ini.

"Padahal, yang mengetahui jalannya program pembangunan ke depan adalah pemerintahan saat ini, apalagi

SBY sudah memimpin 10 tahun, mestinya dilibatkan dalam debat capres yang resmi kenegaraan ini,” tegas Irman.

Ia menganggap, seolah-olah KPU memutus hubungan dengan pemerintahan. Padahal materi program pembangunan itu sedang dijalankan oleh pemerintah. “Juga pasti akan ada pergantian, serah terima jabatan dari presiden yang lama ke yang baru. Jadi, jangan putus hubungan dengan pemerintah SBY,” ujarnya.

Irman menambahkan, dengan melibatkan pemerintahan SBY, agar rakyat tahu persoalan bangsa yang sedang dihadapi, bagaimana tujuan negara ini bisa dicapai ke depan, dan presiden masih bertanggungjawab untuk menjelaskannya.

“Baik tentang kepastian hukum, demokrasi dan politik, ekonomi, pendidikan, dan sebagainya. Harusnya debat ini membuat rakyat lebih cerdas. Tapi, kalau tidak puas, kedua timses juga bisa saling mengundang untuk berdebat,” ujar Irman.

Hal lain yang tidak sesuai UU, kata Irman, debat capres itu diadakan sebanyak 5 kali; yaitu 3 kali debat capres, dan 2 kali debat cawapres. Tidak ada yang berpasangan, tapi katanya sudah disepakati bersama antara penyelenggara dan peserta Pilpres. “Dan dari 3 kali perdebatan itu maka bisa dilihat siapa yang lebih siap menjadi nakhoda negara ini untuk lima tahun ke depan. Bahwa berdebat itu untuk menentukan arah pencapaian tujuan pembangunan, berbangsa, dan bernegara ke depan,” pungkasnya. (sc/nt)/foto:andri/parle/hr

Paripurna DPR Tetapkan Belanja Negara Rp 1.876,9 Triliun



Ketua Banggar Ahmad Noor Supit membacakan laporan hasil kesepakatan Banggar

Rapat Paripurna DPR RI akhirnya menetapkan angka belanja negara dalam APBN Perubahan tahun 2014 sebesar Rp1.876,9 triliun. Sementara angka pendapatan negara dalam APBN Perubahan 2014 ditetapkan sebesar Rp 1.635,4 triliun.

Kesepakatan pembahasan anggaran tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR Rabu (18/6), malam yang dipimpin Wakil Ketua DPR M. Sohibul Iman. Sebelumnya, Rapat Paripurna Rabu pagi yang sedianya mengambil

keputusan terhadap RUU tentang Perubahan APBN 2014 sempat ditunda lantaran Badan Anggaran (Banggar) DPR belum mendapatkan kesepakatan bulat soal anggaran tersebut. Sekitar pukul 20.30 Rapat Paripurna baru dimulai dan berakhir pada pukul 21.30 WIB.

Ketua Banggar Ahmad Noor Supit (F-PG), Rabu malam, langsung membacakan laporan hasil kesepakatan Banggar di hadapan Rapat Paripurna DPR. Dalam laporannya terungkap, belanja negara sebesar Rp 1.876,9 tril-

iun dalam APBN P 2014 itu terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.280,4 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 596,5 triliun.

Sementara itu untuk pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp 1.635,4 triliun, terdiri dari pendapatan dalam negeri sebesar Rp 1.633,1 triliun dan penerimaan hibah sebesar Rp 2,3 triliun. Rapat dihadiri pula Menteri Keuangan M. Chatib Basri.

Dalam laporannya, Ketua Banggar Ahmad Noor Supit juga membacakan hasil kesepakatan asumsi dasar dalam APBN-P 2014. Pertumbuhan ekonomi yang dalam APBN ditetapkan 6,0% disepakati dalam RAPBN 5,5%. Angka inflasi 5,5% menjadi 5,3%. Begitu juga nilai tukar rupiah terhadap dolar disepakati Rp11.600 dari sebelumnya di APBN Rp10.500. Dalam RAPBN 2014, nilai tukar sempat diusulkan Rp 11.700.

Sementara itu, harga minyak disepakati USD105 per barel. Untuk *lifting* minyak disepakati 818 ribu barel per hari, lebih rendah dari APBN 2014 sebesar 870 ribu barel per hari. *Lifting* gas 1.224,0 ribu barel setara minyak per hari. Terakhir kesepakatan *lifting* migas 2.042,0 ribu barel per hari. (mh) foto: odjie/parle/hr.



Wakil Ketua Baleg DPR, Sunardi Ayub yang juga Ketua Panja RUU Disabilitas menerima audiensi Komite Nasional Disabilitas Indonesia, di Ruang Rapat Baleg, Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (16/6)
Foto: Rizka/Parle/Hr.



Komisi III DPR RI RDP dengan Menkumham, KPK, Polri, Jaksa Agung, dan BNN terkait pemotongan Anggaran Kementerian dan Lembaga dipimpin AI Muzammil Yusuf, Selasa (17/6) Foto: Andry/Parle/HR.



Ketua BAKN DPR RI Sumarjati Arjoso didampingi Yahya Sacawiria Rapat Kerja dengan KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan terkait barang sitaan. Kamis (19/6) Foto: Odjie/Parle/Hr.